

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Nugraha, Ade Septia (2021)** Dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung”**, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat masih belum bisa teratasi, khususnya di daerah Teluk Betung Timur. Bencana banjir yang melanda setiap tahun belum juga diatasi oleh pemerintah. Banyak usulan yang disepakati bersama dalam musrenbang hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan sedikit yang terealisasi. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Adapun Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan empat indikator menurut Ryan Nugroho dan Wrihatnolo yaitu sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan musrenbang kecamatan tidak berjalan dengan efektif. Meskipun dalam indikator sistematis dan terpadu sudah efektif tetapi dalam indikator transparan dan akuntabel tidak efektif yang menyebabkan tidak tercapainya

tujuan musrenbang. Masih banyak usulan-usulan yang mendapat skala prioritas dalam musrenbang kecamatan yang belum juga di realisasi pembangunannya, sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat belum dapat diatasi oleh pemerintah daerah.

2. **Abror, Nurul** (2024) Dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara”**, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri I Raden Intan Lampung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) sejatinya merupakan forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan usulan program dari pemerintahan. Dalam praktiknya, Musrenbang memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. salah satu masalah utamanya adalah ketidakmampuan model perencanaan ini tidak mampu memuaskan semua pihak. Hal itu disebabkan desain Musrenbang masih sentralistik (*Top Down Planning*) ditandai dengan pendekatan perencanaan yang seragam antara pusat dan daerah, dan ketergantungan daerah terhadap anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan. Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dengan menggunakan metode

purposive sampling. Pada penelitian ini metode pengumpulan data observasi yang dipergunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu observasi yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan., peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena pelaksanaan desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan dengan pendekatan teori Pembangunan Rostow hasil penelitian Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 menunjukkan menunjukkan Kurangnya efektif dalam proses pelaksanaannya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti, terlambatnya realisasi program, keterbatasan anggaran serta tidak terserapnya seluruh hasil musrenbang di Desa Kota Agung oleh Kecamatan Sungkai Selatan.

B. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Duncan menurut Richad M. Streers dalam Dedi Amrizal dkk (2018:54), efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata efektif memiliki arti efek, akibat, pengaruh atau membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Beni dalam Aryadi Tadi (2020:27) efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Menurut Mardiasmo dalam Joko dkk. (2022:8) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Drucker dalam Mutiarin Dyah & Zaenudin Arif (2021:114) menyatakan bahwa “*effective is to do the right things: while efficiency is to do the things right*” (efektivitas berarti melakukan sesuatu yang benar, sementara efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan benar). Atau juga “*effective means how for we achive the goal and efficiency means how do we mix various properly*”. Efektivitas berarti sejauh mana kita mencapai tujuan, sementara efisiensi berarti bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada dengan cermat.

Menurut Hidayat dkk. (2024:8) efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan dalam suatu tindakan, kegiatan, atau proses. Efektivitas bermakna sebagai ukuran tingkat keberhasilan yang diperoleh oleh suatu aktivitas tertentu, digunakan untuk menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan dapat tercapai.

Menurut Supriyono dalam Amrizal dkk. (2018:40) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan

sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Menurut Hani Handoko dalam Amrizal dkk. (2018:42) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas terjadi pada suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang efisien. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

b. Faktor –faktor yang mempengaruhi efektivitas

Efektivitas merupakan sebagai suatu keberhasilan dalam melakukan program dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dapat menentukan efektivitas organisasi berhasil dilakukan dengan baik atau tidak.

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Steers dalam Vorando Amalo Christo (2019:17-29) sebagai berikut:

1) Karakteristik organisasi

Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia di tempat manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu

hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2) Karakteristik lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek yaitu:

- (a) Aspek lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan keputusan.
- (b) Aspek lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

3) Karakteristik pekerja

Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap didalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus berintegrasi tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4) Karakteristik manajemen

Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia,

tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

c. Ukuran Efektivitas

Menurut Krech dkk. yang dikutip Sudarwan Denim dalam Mudiana dkk. (2024:15) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, di mana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa ukuran efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran efektivitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan

hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

d. Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai target sasaran yang ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator untuk melihat tingkat efektivitas. Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan menurut Richard M. Streers dalam Dedi Amrizal dkk (2018:54).

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan seluruh rangkaian usaha yang harus dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Untuk memastikan tujuan akhir dapat tercapai secara optimal, diperlukan tahapan-tahapan yang jelas, baik dalam bentuk pembagian proses pencapaian maupun berdasarkan periode waktu tertentu. Pencapaian tujuan ini mencakup beberapa aspek penting, seperti jangka waktu pelaksanaan serta sasaran yang menjadi target konkret.

2) Integrasi

Integrasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, membangun kesepahaman, serta menjalin komunikasi dengan berbagai pihak atau organisasi lain. Dalam hal ini, integrasi berkaitan erat dengan proses sosialisasi yang dilakukan organisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan atau kondisi lingkungan yang dihadapi. Untuk menilai kemampuan adaptasi tersebut, dapat dilihat melalui proses pengadaan serta penempatan sumber daya manusia dalam organisasi.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini tidak terlepas dari kajian teoritis yang menjadi dasar dalam memahami variabel penelitian.

Oleh karena itu, setiap indikator disusun dengan mengacu pada teori yang relevan agar memiliki kejelasan makna dan dapat diukur secara tepat. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini disajikan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan indikator penelitian.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dalam Monica Feronica Bormasa, S.Sos., M.Si (2022:139).

1) Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan kondisi di mana organisasi memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh seluruh anggota. Tujuan ini menjadi arah utama sehingga setiap kegiatan yang dilakukan terfokus dan tidak menyimpang.

2) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan adalah adanya rencana tindakan atau langkah-langkah yang terarah dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang jelas membantu organisasi menentukan cara terbaik dalam memanfaatkan sumber daya.

3) Proses Analisis Dan Perumusan Kebijakan Yang Mantap

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi, data, dan situasi secara mendalam sebelum menetapkan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan harus logis, tepat, dan dapat diterapkan secara efektif.

4) Perencanaan Yang Matang

Perencanaan yang matang adalah proses penyusunan rencana kerja yang dilakukan secara teliti, terstruktur, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Perencanaan yang matang meminimalkan risiko kegagalan.

5) Penyusunan Program Yang Tepat

Penyusunan program yang tepat merupakan penjabaran rencana ke dalam program-program kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Program harus relevan, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan yang ada.

6) Tersedianya Sarana Dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana adalah ketersediaan fasilitas, alat, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal.

7) Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik merupakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak hanya bertujuan mengoreksi kesalahan, tetapi

juga memberikan pembelajaran dan perbaikan bagi anggota organisasi agar kinerja semakin baik.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Cambel J. P, dalam Dedi Amrizal dkk (2018:41).

1) Keberhasilan Program

Keberhasilan program merupakan tingkat tercapainya pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Program dikatakan berhasil apabila kegiatan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.

2) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran adalah sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Indikator ini menekankan pada ketepatan hasil program terhadap target yang ingin dicapai.

3) Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat atau menjadi sasaran program, baik itu penerima manfaat maupun pelaksana. Kepuasan ini mencerminkan kualitas hasil dan proses program.

4) Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat *input* dan *output* adalah perbandingan antara sumber daya (*input*) yang digunakan, seperti tenaga, biaya, dan waktu, dengan hasil (*output*) yang diperoleh. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa optimal input tersebut menghasilkan output yang maksimal.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan tingkat keberhasilan organisasi atau program dalam mencapai tujuan secara keseluruhan, tidak hanya sebagian. Indikator ini melihat hasil akhir secara komprehensif sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno, dalam Dedi Amrizal dkk (2018:42).

1) Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan tingkat sejauh mana pihak pelaksana maupun sasaran program memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program. Pemahaman yang baik akan mendukung kelancaran dan keberhasilan program.

2) Tepat Sasaran

Tepat sasaran adalah kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan kelompok atau objek yang menjadi target. Program dikatakan efektif apabila benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan.

3) Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan waktu yang telah direncanakan. Program yang dilaksanakan sesuai jadwal menunjukkan pengelolaan yang baik dan efisien.

4) Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan adalah tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, maka semakin efektif program tersebut.

5) Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan adanya dampak atau hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh sasaran program, baik dalam bentuk peningkatan kondisi, perilaku, maupun kesejahteraan. Perubahan nyata menjadi indikator utama keberhasilan program secara praktis.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Strees, dalam Dedi Amrizal dkk (2018:53).

1) Produktivitas

Produktivitas merupakan kemampuan organisasi dalam menghasilkan *output* secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Semakin tinggi hasil yang dicapai dibandingkan dengan *input* yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya.

2) Kemampuan Adaptasi Kerja

Kemampuan adaptasi kerja adalah kemampuan organisasi atau individu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Adaptasi ini penting agar organisasi tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan tingkat perasaan puas yang dirasakan oleh anggota organisasi terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk kondisi kerja, hubungan kerja, dan penghargaan yang diterima. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja dan efektivitas organisasi.

4) Kemampuan Berlaba

Kemampuan berlaba adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh keuntungan atau manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks organisasi bisnis, laba menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan dan keberlanjutan usaha.

5) Pencarian Sumber Daya

Pencarian sumber daya merupakan kemampuan organisasi dalam memperoleh dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan, seperti tenaga kerja, dana, informasi, dan teknologi. Kemampuan ini menentukan kelangsungan dan efektivitas operasional organisasi.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Makmur, dalam Dedi Amrizal dkk (2018:55-57).

1) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah direncanakan. Ketepatan waktu menunjukkan disiplin dan kemampuan organisasi dalam mengelola aktivitas secara efisien.

2) Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan perhitungan biaya adalah kemampuan dalam merencanakan dan menggunakan anggaran secara tepat sesuai kebutuhan. Perhitungan biaya yang tepat dapat menghindari pemborosan dan memastikan penggunaan dana secara optimal.

3) Ketepatan Dalam Pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran merupakan keakuratan dalam menilai hasil atau kinerja suatu kegiatan. Pengukuran yang tepat menghasilkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan.

4) Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan adalah kemampuan dalam memilih alternatif tindakan atau keputusan yang paling tepat di antara berbagai pilihan yang ada, berdasarkan pertimbangan rasional dan tujuan yang ingin dicapai.

5) Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir merupakan kemampuan dalam menganalisis masalah secara logis, sistematis, dan objektif. Ketepatan berpikir akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

6) Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

ketepatan dalam melakukan perintah adalah kesesuaian dalam melaksanakan tugas atau instruksi sesuai dengan arahan yang diberikan. Hal ini mencerminkan disiplin serta kejelasan komunikasi dalam organisasi.

7) Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan kemampuan dalam menetapkan tujuan yang jelas, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan yang tepat menjadi dasar dalam menentukan arah kegiatan.

8) Ketepatan-Ketepatan Sasaran

Ketepatan-ketepatan sasaran adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan target atau sasaran yang telah ditentukan. Program dikatakan efektif apabila benar-benar mencapai sasaran yang dituju.

Pengukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Streers (1977), dalam Nur Asni Gani dkk 2020:119-120).

1) Produksi

Produksi merupakan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Produksi menunjukkan tingkat *output* yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.

2) Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*). Efisiensi menunjukkan sejauh mana organisasi mampu menggunakan sumber daya secara hemat dan optimal.

3) Kepuasan

Kepuasan merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh anggota organisasi maupun pihak yang menerima manfaat. Kepuasan ini berkaitan dengan kondisi kerja, hasil yang diperoleh, serta terpenuhinya harapan.

4) Kemampuan Adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Organisasi yang adaptif akan lebih mampu bertahan dan berkembang.

5) Perkembangan

Perkembangan merupakan kemampuan organisasi untuk mengalami kemajuan atau peningkatan dari waktu ke waktu, baik dalam hal kinerja, kualitas sumber daya manusia, maupun inovasi. Perkembangan menunjukkan keberlanjutan efektivitas organisasi dalam jangka panjang.

2. Musyawarah

a. Pengertian Musyawarah

Menurut Budiardjo Miriam dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008:50) musyawarah adalah proses pembahasan bersama dalam rangka pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Musyawarah menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi karena bertujuan mencapai kesepakatan (mufakat) yang dapat diterima oleh semua pihak.

Menurut Koentjaraningrat dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi (2009:145) musyawarah adalah suatu proses sosial dalam masyarakat yang dilakukan melalui perundingan bersama untuk mencapai

kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah mencerminkan nilai budaya Indonesia yang mengutamakan kebersamaan, keharmonisan, dan penghindaran konflik terbuka.

Menurut Az-Zuhaili Wahbah dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (2009:84) musyawarah merupakan suatu proses pertukaran pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas suatu persoalan tertentu dengan tujuan memperoleh keputusan yang paling benar dan membawa kemaslahatan bersama. Dalam musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pertimbangan kolektif, bukan keputusan sepihak.

Menurut Soekanto Soerjono dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* (2012: 102) musyawarah adalah suatu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui proses komunikasi yang terarah dan terstruktur. Dalam musyawarah, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara bebas namun tetap bertanggung jawab.

Menurut Abdullah Dudung dalam buku *Pengantar Ilmu Sosial* (2014:245) musyawarah adalah suatu forum atau majelis yang digunakan untuk menampung berbagai pendapat dan gagasan secara teratur guna mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama.

Menurut Azhari Fitriadi Aidul dalam buku *Demokrasi dan Autokrasi: Gagasan, Model, dan Rekonstruksi* (2019) Musyawarah

merupakan konsep dasar dalam demokrasi yang mengandung makna saling memberi pertimbangan untuk mencapai keputusan bersama.

Menurut Muzaqqi Fahrul dalam buku *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia* (2019) Musyawarah adalah tradisi kolektif dalam masyarakat Indonesia yang digunakan untuk menyatukan pendapat melalui proses diskusi demi mencapai mufakat.

Menurut Hafidzi Anwar dalam *Pendidikan Bermusyawarah dalam Kehidupan Bernegara* (2019) Musyawarah adalah cara merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak banyak orang melalui kesepakatan bersama (mufakat), tidak selalu berdasarkan suara terbanyak.

3. Perencanaan Pembangunan

a. Pengertian Perencanaan

Menurut Djoko Sutarjo dalam buku *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan* (2021:121) perencanaan adalah usaha untuk memanfaatkan sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan, yang berguna untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjoyo mengartikan sebagai suatu cara atau alat untuk mencapai tujuan.

Menurut M. Munandar dalam buku *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan* (2021:122) perencanaan sebagai penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas yang akan dilakukandiwaktu perencanaan sebagai suatu proses yang

berkesinambungan yang akan datang. Sedangkan menurut Lincolin Arsyad perencanaan mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Menurut Conyers & Hills (1994) dalam buku Perencanaan Pembangunan Wilayah (2010:5) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Menurut Friedman dalam buku Perencanaan Pembangunan Wilayah (2010:5) perencanaan pada dasarnya adalah cara berpikir tentang masalah sosial dan ekonomi, perencanaan terutama berorientasi pada masa depan, sangat memperhatikan hubungan antara tujuan dengan keputusan kolektif dan berupaya mencapai komprehensivitas dalam kebijakan dan program.

b. Pengertian Pembangunan

Menurut Riyadi (1981) dalam buku Pembangunan Berbasis Masyarakat (2015:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Menurut Mardikanto (2009) dalam buku Pembangunan Berbasis Masyarakat (2015:6) Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Menurut buku Pembangunan Berbasis Masyarakat (2015:3) Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan.

c. Pengertian perencanaan pembangunan

Menurut Arthur W. Lewis (1965) dalam buku Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi (2016:24-25) perencanaan pembangunan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Menurut M.L. Jhingan dalam buku Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi (2016:25) perencanaan pembangunan

pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

d. Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Mengikuti Lincolin Arsyad (2001), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu: Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Jangka Pendek. Pengertian dari masing-masing jenis perencanaan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sedangkan dewasa ini rencana Pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Malah ada pula jenis perencanaan pembangunan yang mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana jangka panjang (*Long-term Planning*) biasanya disebut juga sebagai perencanaan perspektif (*Perspective Planning*) yang berisikan arah

pembangunan secara umum. Dengan kata lain, perencanaan jangka panjang berisikan pandangan jauh ke depan tentang kerangka pembangunan (*Blue-Print*) yang disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat secara umum. Karena itu, perencanaan jangka panjang lebih bersifat *makro* (menyeluruh) dan tidak sampai kepada program dan kegiatan secara rinci.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah (*Medium-term Planning*) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka panjang berisikan perumusan kerangka ekonomi makro, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden atau kepala daerah terpilih. Di samping itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga sering kali juga dinamakan sebagai rencana tahunan (*Annual Planning*). Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari Rencana Jangka Menengah. Di samping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat nasional (RAPBN) maupun tingkat daerah (RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

e. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan. Tahap Pertama adalah penyusunan rencana, Tahap Kedua, penetapan rencana Tahap Ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan Tahap Keempat, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya.

1. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencanaan, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencanaan sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencanaan yang terdapat pada badan perencanaan tidak mencukupi. Namun demikian, bila dimungkinkan sebaiknya penyusunan rencana dilakukan sendiri oleh badan perencanaan sendiri dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli tambahan dari instansi dan badan lainnya yang terkait. Hal ini sangat penting artinya agar perencanaan tersebut lebih bersifat operasional dengan menjaga keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaannya.

2. Tahap Penetapan Rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencanaan adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penetapan rencana oleh kepala daerah pada

umumnya berjalan lancar bilamana BAPPEDA telah melakukan finalisasi setelah memasukkan hasil MUSRENBANG. Akan tetapi, penetapan rencana melalui DPRD sering kali memerlukan proses yang juga cukup memakan waktu karena diperlukan pembahasan kembali oleh pihak dewan. Bahkan adakalanya dewan melakukan kembali pembahasan dengan para tokoh masyarakat untuk mendapatkan penilaian terhadap rancangan rencana yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (*monitoring*) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam kegiatan pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan dan menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut berjalan lancar sesuai dengan rencana baik dari segi fisik maupun pemanfaatan dana.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberikan hasil (*outcome*) sesuai. Selanjutnya perlu pula dievaluasi, bilamana kegiatan dan objek pembangunan dengan yang direncanakan semula. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode Evaluasi Kinerja yang paling kurang didasarkan atas tiga unsur evaluasi utama yaitu: unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

4. Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Yanti Winda (2020:27) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Ladsan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Efendi Rustam (2010:18) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangna untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2002:19) desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis yaitu menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal atau menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik corak kehidupan mereka yang relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengetian sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial serta adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendididkannya relatif rendah dan lain sebagainya. Kedua, pengetian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintah Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai "suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan masyarakat sendiri".

b. Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Nandraha (1970:71) membangun desa adalah setiap pembangunan yang ada dalam proses masyarakat desa berpartisipasi.

Menurut Batten dalam Yanti Winda (2020:29) pembangunan desa adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mula mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka yang kemudian mereka merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan, dan ruang lingkup pembangunannya.

Berikut ini penjelasannya mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006-18-20):

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati

masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (sustainable);

2. Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta penguatan kelembagaan;
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan ini (meliputi pengairan, jalan, lingkungan, pemukiman, dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawaaan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

1. Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Menurut Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (2008) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang

akan direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

2. Kerangka Hukum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah, termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Musrenbang sendiri perwujudan dari kewenangan desa dalam mengatur daerahnya, sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang, yaitu :

- a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
- d. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.
- e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

4. Prinsi-Prinsip Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Prinsip-prinsip musrenbang desa, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang, baik untuk pemandu, peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.

- a. Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat.
- b. Prinsip musyawarah. Peserta musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosioekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan.
- c. Prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-

keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

- d. Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling diam untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda.
- e. Prinsip anti-diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.
- f. Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

C. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan melalui tahapan yang sistematis dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah baik di tingkat pusat maupun

daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk implementasi dari sistem perencanaan pembangunan tersebut adalah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang merupakan forum partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan desa. Melalui Musrenbangdes, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, serta kebutuhan yang menjadi prioritas pembangunan di desa.

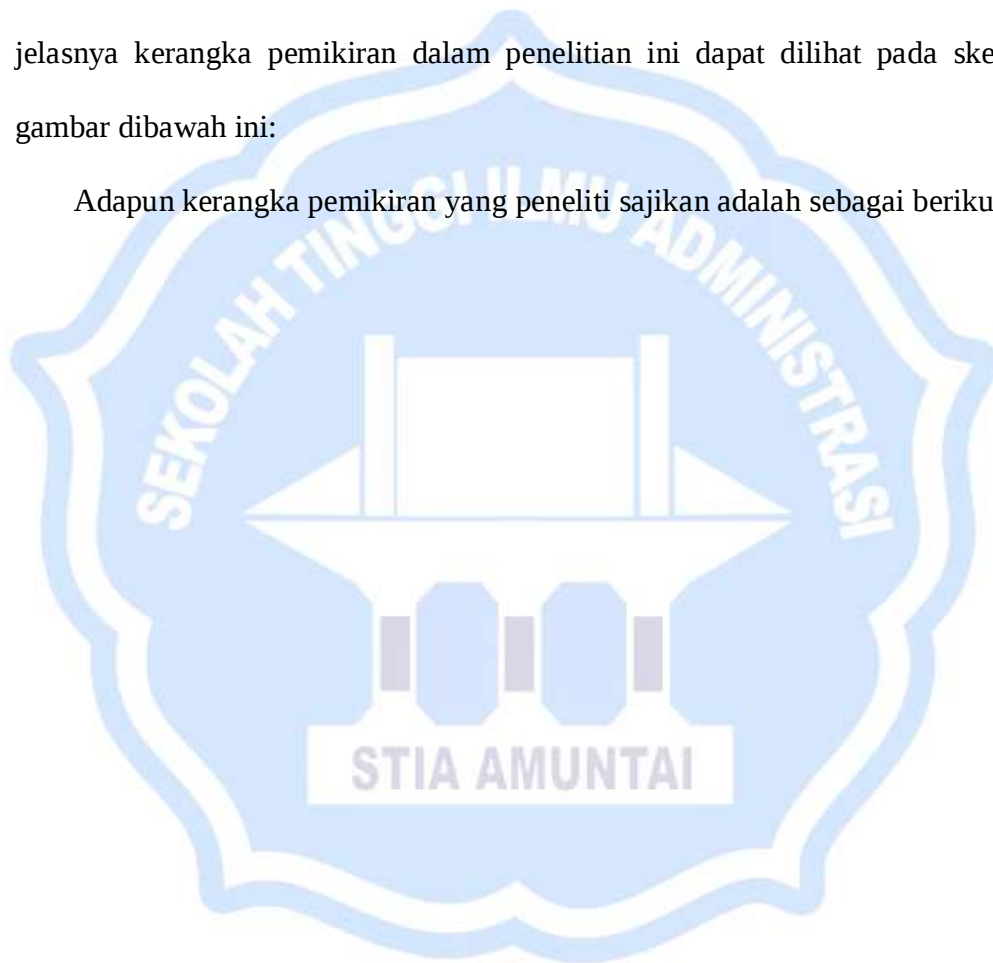
Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, pelaksanaan Musrenbangdes memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan, serta belum optimalnya penyelarasan antara usulan masyarakat dengan program yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat partisipasi masyarakat, transparansi dalam proses perencanaan, serta koordinasi antara pemerintah desa dan pihak terkait.

Dengan demikian, apabila Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikir di atas, maka peneliti berkeyakinan bahwa dengan melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”** dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan yang masih jauh dikatakan baik dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema gambar dibawah ini:

Adapun kerangka pemikiran yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

